

**TINJAUAN *FIQH SIYASA* TERHADAP PUTUSAN NOMOR
35/G/2020/PTUN.SBY TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK
PAKAI NOMOR 00010 KELURAHAN PACARKEKELING**

SKRIPSI

Oleh

Siti Sri Hardiani

NIM. C94217103



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Sri Hardiani
NIM : C94217103
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Nomor
35/G/2020/PTUN.SBY Tentang Pembatalan
Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010 Kelurahan
Pacarkeling

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 April 2023

Saya yang menyatakan



Siti Sri Hardiani

C94217103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Siti Sri Hardiani

NIM. : C94217103

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan

Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY Tentang Pembatalan

Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010 Kelurahan Pacarkeling

ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 19 Juni 2024

Pembimbing,



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

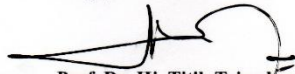
Nama : Siti Sri Hardiani

NIM. : C9421713

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Majelis Munaqosah Skripsi

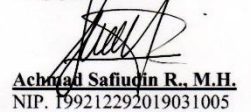
Penguji I



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H.

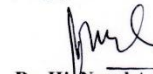
NIP. 196803292000032001

Penguji III



Achmad Saffudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

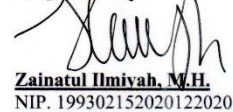
Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiva Nadhifa, M.H.I.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV



Zainatul Umimah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 28 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Dekan,



M. Saiful Umbara'ah, M. Ag.
NIP. 1971999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031- 8431972 Fax.031- 8413300
E- Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Sri Hardiani

NIM : C94217103

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik

E- mail address : sitisrihardiani96@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain- lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN NOMOR 35/G/2020/PTUN.SBY
TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 00010 KELURAHAN
PACARKELING

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih- media/format- kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Juli 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SITI SRI HARDIANI' in a stylized, cursive script.

(SITI SRI HARDIANI)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang kewenangan absolut PTUN dalam mengadili gugatan tentang pembatalan sertifikat hak pakai. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap putusan PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY dan bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap putusan PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY tentang pembatalan sertifikat hak pakai di kelurahan Pacarkeling.

Penelitian hukum pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini mengumpulkan berbagai data dengan menggunakan teknik studi pustaka. Objek kajian primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan objek kajian sekunder meliputi penelitian dan pendapat para ahli serta teori-teori hukum yang tercantum dalam buku hukum. Bahan-bahan tersebut akan dianalisa secara deskriptif kualitatif dan disusun secara sistematis serta dikaji secara deduktif sehingga sapat menjadi sebuah penelitian mengenai analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 35/G/2020/PTUN.SBY yang ditinjau dari *wilāyah al-mazālim*.

PTUN mempunyai kompetensi absolut untuk mengadili sengketa TUN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II merupakan Pejabat TUN yang menjalankan urusan pemerintahan. Rektor Universitas Negeri Surabaya mempunyai kualifikasi sebagai subjek Penggugat, karena Pemerintah sering bertindak sebagai *twee petten* yaitu sebagai wakil dari jabatan dan wakil dari badan hukum. Oleh karena itu Rektor Universitas Negeri Surabaya memiliki *legal standing* dan mempunyai kepentingan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan dalam kajian *fiqh siyāsah* terdapat lembaga peradilan yang dikenal sebagai *wilāyah al-mazālim*, yang khusus menangani kezaliman para penguasa terhadap rakyat, termasuk dalam perbuatan kebijakan.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa diharapkan peran peradilan TUN dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan terhadap pihak BPN dapat lebih teliti lagi dalam mengeluarkan sertifikat terutama sertifikat hak pakai. Agar tindakan yang seperti itu tidak berpotensi mengakibatkan kerugian pada pihak lain dikemudian hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Penelitian	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP <i>WILĀYAH AL-MAZĀLIM</i> DALAM <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	24
A. Konsep Peradilan Tata Usaha Negara	24
B. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara	25
C. Tugas dan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara	28
D. Kompetensi Relatif dan Absolut Peradilan Tata usaha Negara	30
E. Konsep <i>Wilāyah Al-Mazālim</i>	35
F. Dasar Hukum <i>Wilāyah Al-Mazālim</i>	38
G. Kedudukan <i>Wilāyah Al-Mazālim</i>	40

H. Tugas dan Wewenang <i>Wilayah Al-Mazālim</i>	42
I. Kompetensi <i>Wilayah Al-Mazālim</i>	44
BAB III PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 35/G/2020/PTUN.SBY TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 00010 KELURAHAN PACARKELING	48
A. Deskripsi Kasus	48
B. Putusan PTUN Surabaya Nomor 35/G/2020/PTUN.Sby	50
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR 35/G/2020/PTUN.SBY TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 00010 KELURAHAN PACARKELING	59
A. Analisis Putusan Ptun Nomor 35/G/2020/Ptun.Sby Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010 Kelurahan Pacarkeling	59
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> Terhadap Putusan Ptun Nomor 35/G/2020/Ptun.Sby Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00010 Kelurahan Pacarkeling	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ash-Shiddieqy, T. M. Habi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 8. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chomzah, Ali Achmad. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djalil, A.Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Hadjon, Phillipus M. et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jailani, Imam Amrusi, et al., *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Kotto, Alaidin, et al., *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada. *Fiqh siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muwahid. *Pokok-Pokok Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016.
- Pulungan, J. Syuyuthi. *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudarsono. *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sugitario, Eko dan Tjodro Tirtamulia. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Surabaya: Brilian Internasional, 2012).
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1990.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Gukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wijaya, Arif. *Hukum Tata Usaha Negara*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

2. JURNAL

- Satriadiana, Dewa Putu. "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Maratam Nomor 52/G/2010/PTUN.MTR Terhadap Pembatalan Sertifikat Pengganti Hak Milik Atas Tanah". *Jurnal IUS*. Volume V Nomor 2 Agustus, 2017.
- Sina, La. "Kedudukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justita*, Volume 28 No. 1 April, 2010.

3. PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Accessed Juni 05, 2021,

<https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20Nomor%205%20Tahun%201986.pdf.pdf>.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Accessed Juni 05, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38851/uu-no-51-tahun-2009>.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Accessed Juni 05, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40500/uu-no-9-tahun-2004>.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Accessed Juni 05, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*, Accessed Juni 05, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206066/perma-no-6-tahun-2018>.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Accessed Juni 05, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/128708/permen-agrariakepala-bpn-no-7-tahun-2019>.

4. WEBSITE

Adminsln, "Ini Hak-Hak Atas Tanah Yang Ada Di Indonesia", dalam <https://smartlegalnetwork.com/2018/09/ini-hak-hak-atas-tanah-yang-ada-di-indonesia/>, diakses pada 06 April 2021.